



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menjelang Pilkada, Aturan Perilaku ASN Perlu Dipertegas

Jakarta, 19 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 121/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap UUD 1945 pada Kamis (19/9) pukul 14.00 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomasi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 20/2023**

Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagai kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang:

d. pengawasan penerapan Sistem Merit.

- **Pasal 70 ayat (3) UU 20/2023**

Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.

Dalam permohonan dijelaskan bahwa para Pemohon memperoleh informasi bahwa Komisi ASN (KASN) telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang Pemilu Serentak 2024 lalu. Kemudian, dari 1.023 dugaan pelanggaran yang diregistrasi Badan Pengawas Pemilu, 69 di antaranya ditemukan merupakan pelanggaran administrasi oleh kepala daerah dan pelanggaran kode etik oleh aparatur sipil negara. Sehingga, dalam perhatian terhadap Pilkada Serentak, para Pemohon berharap agar MK menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU *a quo* inkonstitusional apabila pengawasan penerapan Sistem Merit tidak dimaknai juga asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Sejalan dengan itu, terhadap peran KASN yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU *a quo*, para Pemohon meminta MK agar menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d”.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130